

## Pemetaan Tantangan dan Kebutuhan Penyuluhan Pertanian dalam Upaya Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian

**Fara Shaliza**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA Lancang Kuning, Dumai, Indonesia

Email: fara.shaliza@stia-lk-dumai.ac.id

### **Informasi Artikel**

Submitted : 25-10-2025

Accepted : 23-11-2025

Published : 15-12-2025

### **Keywords:**

Agricultural Extension Agent  
Agricultural Extension Services  
Extension Needs  
Extension Quality  
Community Services

### **Abstract**

*Agricultural extension agents play a strategic role in improving the quality of agricultural extension services and supporting sustainable agricultural development. However, in practice, extension agents face various challenges that can limit the effectiveness of field-level extension activities. This community service program aimed to identify the challenges faced by agricultural extension agents, map their actual needs, and formulate priority scales to address them, thereby improving the quality of agricultural extension services. The activity was conducted at the Agricultural Extension Center (BPP) of Dumai Selatan District, Dumai City, involving agricultural extension agents as the main partners. A participatory approach was applied through focused group discussions (mini FGDs), combined with awareness-building activities, capacity enhancement, and consultation and mentoring. The results indicate that the challenges faced by extension agents are multidimensional, covering structural, technical, institutional, and psychosocial aspects. The primary needs identified include capacity building through relevant and continuous training, support for extension facilities and infrastructure, and the strengthening of institutional coordination. Through collective deliberation, a priority scale of needs was formulated as a key output of the program. The activity was supported by the active participation and openness of extension agents, though it was constrained by limited time due to their workload. Overall, this community service activity produced a contextual mapping of extension agents' challenges and needs, which can serve as a practical basis for planning more targeted and sustainable agricultural extension strengthening programs.*

### **Abstrak**

Penyuluhan pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya penyuluhan pertanian menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat kinerja dan efektivitas penyuluhan di lapangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penyuluhan pertanian, memetakan kebutuhan penyuluhan, serta merumuskan skala prioritas pemenuhan kebutuhan dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian. Kegiatan dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dengan melibatkan penyuluhan pertanian sebagai mitra utama. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (mini FGD) yang dikombinasikan dengan kegiatan penyadaran, peningkatan pemahaman, serta konsultasi dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tantangan penyuluhan pertanian bersifat multidimensional, meliputi aspek struktural, teknis, kelembagaan, dan psikososial. Kebutuhan utama penyuluhan mencakup peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, dukungan sarana dan prasarana penyuluhan, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Melalui musyawarah bersama, disusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan sebagai luaran utama kegiatan. Kegiatan ini didukung oleh partisipasi aktif dan keterbukaan penyuluhan, namun masih menghadapi keterbatasan waktu pelaksanaan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menghasilkan pemetaan kebutuhan dan tantangan penyuluhan yang kontekstual dan dapat menjadi dasar perencanaan program penguatan penyuluhan pertanian yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Pertanian, Kebutuhan Penyuluhan, Kualitas Penyuluhan, Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan nonformal yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas petani agar mampu mengelola usaha tani secara produktif, efisien, dan berkelanjutan. Penyuluhan berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha pertanian untuk mengakses informasi, teknologi, pasar, permodalan, serta sumber daya pendukung lainnya secara mandiri dan terorganisasi. Secara normatif, peran strategis penyuluhan pertanian di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang menempatkan penyuluhan sebagai instrumen utama dalam pembangunan pertanian berbasis pemberdayaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Dalam praktiknya, penyuluhan pertanian tidak lagi dipahami hanya sebagai proses transfer teknologi, tetapi merupakan proses interaksi, pembelajaran sosial, dan pendampingan yang menuntut kapasitas adaptif penyuluhan terhadap dinamika lapangan. Peran penyuluhan pertanian sebagai agen perubahan menjadi semakin penting dalam mendorong adopsi inovasi, peningkatan kapasitas petani, dan keberlanjutan sistem pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi (Khan dkk., 2022). Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kualitas relasi antara penyuluhan dan petani, dukungan sistem kelembagaan, serta kemampuan penyuluhan dalam merespons perubahan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi pertanian (Hermans dkk., 2023; Tran dkk., 2025). Dalam konteks transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem penyuluhan juga berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, namun dampaknya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan informasi secara optimal (Mirza dkk., 2023).

Di sisi lain, penyuluhan pertanian sebagai aktor kunci di tingkat lapangan menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan perannya secara optimal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tantangan penyuluhan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan, seperti rasio penyuluhan dan petani yang tidak seimbang, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor (Sartas dkk., 2020; Kule dkk., 2025). Studi empiris di berbagai daerah di Indonesia juga mengungkapkan bahwa faktor internal dan eksternal, seperti tingkat pendidikan, pelatihan, motivasi kerja, serta dukungan kelembagaan, berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluhan pertanian (Jamil dkk., 2023; Modeong dkk., 2023). Selain itu, aspek psikososial seperti beban kerja yang tinggi dan rendahnya apresiasi terhadap profesi penyuluhan turut memengaruhi motivasi dan kinerja penyuluhan di lapangan.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi mitra dalam kegiatan ini adalah belum tersedianya pemetaan kebutuhan dan tantangan penyuluhan pertanian yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman lapangan. Selama ini, perencanaan peningkatan kapasitas penyuluhan cenderung bersifat top-down dan belum sepenuhnya merefleksikan kondisi nyata yang dihadapi penyuluhan dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, program penguatan penyuluhan sering kali kurang tepat sasaran dan sulit diimplementasikan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini menawarkan solusi berupa pemetaan kebutuhan dan tantangan penyuluhan pertanian melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk diskusi kelompok terarah (mini FGD) yang melibatkan penyuluhan sebagai subjek utama kegiatan. Melalui proses ini, penyuluhan secara aktif mengidentifikasi hambatan, kebutuhan, serta prioritas dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian. Partisipasi mitra tidak hanya terbatas sebagai responden, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat langsung dalam proses analisis dan perumusan kebutuhan.

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini meliputi peta tantangan penyuluhan pertanian, pemetaan kebutuhan penyuluhan berdasarkan aspek teknis, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia, serta skala prioritas pemenuhan kebutuhan sebagai dasar perencanaan program penguatan penyuluhan ke depan. Luaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penyuluhan sebagai sarana refleksi dan penguatan kapasitas, serta oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program penyuluhan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan PKM ini difokuskan pada upaya pemetaan tantangan dan kebutuhan penyuluhan pertanian sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas sistem penyuluhan pertanian secara berkelanjutan. Rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah: (1) apa saja tantangan yang dihadapi penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian? (2) apa saja kebutuhan yang diperlukan penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian? (3) bagaimana skala prioritas pemenuhan kebutuhan penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian? Adapun tujuan kegiatan PKM ini adalah: (1) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, (2) memetakan kebutuhan yang diperlukan penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, dan (3) merumuskan skala prioritas pemenuhan kebutuhan penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian.

## 2. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik pertanian yang beragam serta menghadapi tantangan penyuluhan yang kompleks, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana pendukung, maupun dinamika sosial ekonomi petani. Kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2025 dan melibatkan penyuluhan pertanian sebagai mitra utama pengabdian.

Peserta kegiatan terdiri atas penyuluhan pertanian, dengan latar belakang usia, pengalaman kerja, dan status kepegawaian yang beragam. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak empat orang penyuluhan pertanian dan satu orang petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Keberagaman latar belakang peserta diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan penyuluhan pertanian berdasarkan pengalaman lapangan masing-masing penyuluhan.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dengan mengombinasikan metode penyadaran, peningkatan pemahaman, serta konsultasi dan pendampingan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan ruang yang setara bagi penyuluhan dalam menyampaikan pengalaman, kendala, serta kebutuhan yang dihadapi dalam menjalankan tugas penyuluhan. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam kegiatan pengabdian karena mampu mendorong keterlibatan aktif mitra, memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses dan hasil kegiatan, serta menghasilkan solusi yang lebih kontekstual (Akbar dkk., 2022; Handono dkk., 2023). Kegiatan diawali dengan penyampaian materi pengantar mengenai peran strategis penyuluhan pertanian dan pentingnya pemetaan kebutuhan sebagai dasar perbaikan kualitas penyuluhan. Materi disampaikan secara interaktif untuk mendorong keterlibatan aktif peserta.

Selanjutnya, kegiatan inti dilaksanakan melalui diskusi kelompok terarah (mini FGD) yang difasilitasi oleh tim pengabdian (Gambar 1). Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan, baik yang bersifat teknis, struktural, kelembagaan, maupun psikososial. Metode FGD dipilih karena mampu menggali persepsi, pengalaman, dan kebutuhan peserta secara mendalam melalui interaksi kelompok dan dialog yang terarah (Roy dkk., 2024; Lestari dkk., 2024). Diskusi dilakukan secara terbuka dan dialogis sehingga penyuluhan dapat menyampaikan pandangan dan pengalaman secara langsung berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan kegiatan.



Gambar 1. Mini FGD  
(Sumber gambar: penulis)

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup proses konsultasi dan pendampingan dalam merumuskan kebutuhan penyuluhan serta menyusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan tersebut. Penyuluhan dilibatkan secara aktif dalam menentukan kebutuhan yang dianggap paling mendesak dan relevan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian. Proses ini dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah dan kesepakatan kelompok, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kebutuhan riil penyuluhan dan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi. Pendekatan FGD yang dikombinasikan dengan konsultasi dan pendampingan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama dan pengambilan keputusan partisipatif (Akbar dkk., 2022; Handono dkk., 2023).

Luaran dari kegiatan ini berupa peta tantangan penyuluhan pertanian, pemetaan kebutuhan penyuluhan berdasarkan berbagai aspek, serta skala prioritas pemenuhan kebutuhan yang disepakati bersama. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk mendorong partisipasi aktif mitra, memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil kegiatan, serta memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bersifat kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini sejalan dengan praktik pengabdian berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi dan keberlanjutan program (Lestari dkk., 2024). Metode ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan program penguatan penyuluhan pertanian yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Implementasi Solusi melalui Pendekatan Partisipatif

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan implementasi solusi berupa pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (mini FGD). Pendekatan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog antara penyuluh pertanian sebagai mitra kegiatan dengan tim pengabdian, sehingga permasalahan dan kebutuhan yang diidentifikasi benar-benar bersumber dari pengalaman lapangan penyuluh. Selama pelaksanaan kegiatan, penyuluh menunjukkan partisipasi aktif dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas penyuluhan, baik yang berkaitan dengan aspek teknis, kelembagaan, maupun kondisi sosial di wilayah kerja masing-masing.

Pendekatan partisipatif ini memungkinkan penyuluh untuk tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek utama dalam proses pemetaan masalah dan kebutuhan. Melalui diskusi yang terbuka dan dialogis, penyuluh dapat saling berbagi pengalaman, memperkuat pemahaman bersama, serta mengklarifikasi permasalahan yang selama ini dirasakan secara individual namun belum terwadahi secara sistematis dalam forum formal. Pendekatan diskusi kelompok terarah dilaporkan efektif dalam kegiatan pengabdian karena mampu menggali persepsi, pengalaman, dan kebutuhan aktor lapangan secara kolektif serta mendorong keterlibatan aktif mitra dalam proses perumusan solusi (Akbar dkk., 2022; Handono dkk., 2023; Roy dkk., 2024; Lestari dkk., 2024). Temuan ini sejalan dengan studi yang menekankan bahwa pendekatan partisipatif dan pembelajaran sosial berbasis pengalaman lapangan berperan penting dalam memperkuat kapasitas aktor pertanian dan membangun pemahaman bersama terhadap permasalahan pembangunan pertanian (Kansanga dkk., 2021).

#### Pemetaan Tantangan Penyuluhan Pertanian

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluh pertanian menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama. Dari aspek struktural, penyuluh mengemukakan tingginya beban kerja akibat rasio jumlah penyuluh dan petani yang tidak seimbang, serta luas wilayah binaan yang cukup besar. Kondisi ini membatasi intensitas pendampingan dan interaksi penyuluh dengan petani. Kondisi beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya tersebut juga berimplikasi pada rendahnya capaian kinerja penyuluh, karena evaluasi kinerja sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks kerja lapangan dan dukungan sistem penyuluhan yang tersedia (Astari dkk., 2023).

Dari aspek teknis, penyuluh menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan, termasuk akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata. Hal ini berdampak pada keterbatasan penyuluh dalam mengakses dan mendiseminasi informasi pertanian secara cepat dan efektif. Selain itu, penyuluh juga menyampaikan keterbatasan dalam memperoleh pelatihan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Keterbatasan akses informasi dan teknologi informasi merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas layanan penyuluhan dan proses diseminasi pengetahuan pertanian kepada petani (Perosa dkk., 2021). Rendahnya literasi digital aktor lapangan turut memperlemah pemanfaatan teknologi yang tersedia, sehingga teknologi belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat peningkatan kinerja dan kualitas layanan penyuluhan (Hildawati dkk., 2024).

Aspek kelembagaan turut menjadi tantangan penting, terutama terkait koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan. Penyuluh menilai bahwa program dan kebijakan penyuluhan yang ada belum sepenuhnya selaras dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Di sisi lain, aspek psikososial seperti motivasi kerja, tingkat apresiasi terhadap profesi penyuluh, serta dukungan moral juga muncul sebagai isu yang memengaruhi kinerja penyuluh secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pertanian dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, teknis, kelembagaan, serta faktor internal dan eksternal penyuluh (Indrawati dan Yuliantoro, 2022; Jamil dkk., 2023; Modeong dkk., 2023; Sartas dkk., 2020; Kule dkk., 2025).

Berbagai tantangan struktural, teknis, kelembagaan, dan psikososial yang teridentifikasi melalui diskusi kelompok terarah tersebut selanjutnya dirangkum dan disistematisasi dalam bentuk pemetaan tantangan penyuluh pertanian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

#### Pemetaan Kebutuhan Penyuluh Pertanian

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi penyuluh pertanian, hasil diskusi kelompok terarah juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan utama yang secara langsung berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Berdasarkan diskusi kelompok terarah, kebutuhan penyuluh pertanian yang teridentifikasi mencakup beberapa aspek utama. Kebutuhan peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan, khususnya terkait pelatihan teknis yang aplikatif, penguatan literasi digital, serta pengembangan kompetensi komunikasi dan fasilitasi kelompok tani. Penyuluh menilai bahwa peningkatan kapasitas yang berkelanjutan sangat

diperlukan untuk menjawab dinamika pertanian yang terus berubah. Temuan ini sejalan dengan pendekatan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan yang menekankan pentingnya investasi pada *human capital* melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, dan dukungan sistem agar penyuluhan mampu menjalankan perannya secara efektif (Busindeli dkk., 2024). Selain itu, pengetahuan dan persepsi aktor pertanian terbukti berperan penting dalam membentuk sikap dan pengambilan keputusan, sehingga peningkatan kapasitas penyuluhan menjadi faktor kunci dalam efektivitas pendampingan dan adopsi inovasi pertanian (Delgado dan Stoorvogel, 2022). Temuan ini juga menguatkan hasil evaluasi program pelatihan yang menunjukkan bahwa pelatihan yang tidak berbasis pada pemetaan kebutuhan riil berpotensi kurang efektif dalam meningkatkan kinerja peserta (Erlanti dkk., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kapasitas penyuluhan perlu dipahami sebagai proses strategis penguatan sumber daya manusia yang berkelanjutan, di mana investasi pada kompetensi, pembelajaran sepanjang hayat, dan dukungan kelembagaan merupakan prasyarat utama dalam membangun kinerja dan profesionalisme penyuluhan secara jangka panjang (Adhikara dkk., 2025).

Selain itu, kebutuhan akan dukungan sarana dan prasarana penyuluhan juga menjadi perhatian utama. Penyuluhan mengharapkan tersedianya fasilitas pendukung yang memadai untuk menunjang kegiatan penyuluhan di lapangan, termasuk media penyuluhan yang lebih variatif dan berbasis teknologi. Kebutuhan penguatan kelembagaan juga mengemuka, terutama terkait peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain serta kejelasan sistem dukungan dalam pelaksanaan tugas penyuluhan. Kebutuhan peningkatan kapasitas dan dukungan kelembagaan ini juga ditemukan dalam berbagai studi yang menegaskan bahwa kualitas penyuluhan sangat ditentukan oleh kompetensi penyuluhan dan dukungan sistem yang menyertainya (Latif dkk., 2022; Indrawati dan Yuliantoro, 2022).

### **Skala Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Penyuluhan**

Melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama, penyuluhan bersama tim pengabdian menyusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Prioritas utama difokuskan pada kebutuhan yang dinilai paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas penyuluhan, yaitu peningkatan kapasitas penyuluhan melalui pelatihan yang relevan dan kontekstual. Prioritas berikutnya adalah pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan, diikuti oleh penguatan kelembagaan dan sistem koordinasi.

Penyusunan skala prioritas ini menjadi salah satu luaran utama kegiatan pengabdian, karena dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program penguatan penyuluhan pertanian yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan nyata penyuluhan. Dengan adanya prioritas yang jelas, diharapkan intervensi yang dilakukan ke depan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

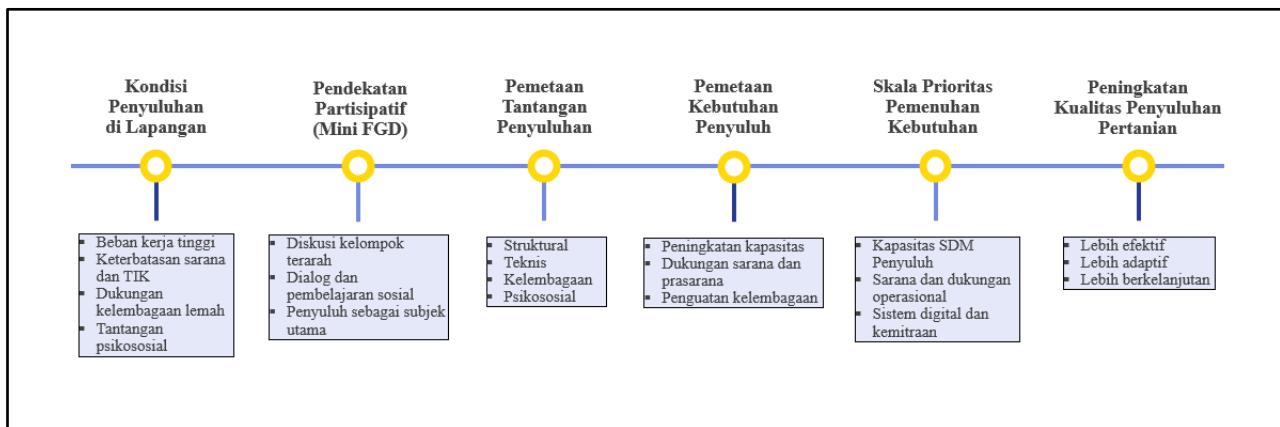
Berdasarkan diskusi kelompok terarah, kebutuhan penyuluhan pertanian yang teridentifikasi mencakup beberapa aspek utama yang secara ringkas ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan tantangan, kebutuhan, dan skala prioritas penyuluhan pertanian

No	Tantangan	Kebutuhan	Stakeholders
1	Pengembangan kompetensi/kapasitas	Pelatihan teknis yang aplikatif, penguatan <i>soft skills</i> (komunikasi dan fasilitasi), serta pendampingan berbasis kebutuhan lapangan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani
2	Dukungan operasional	Dukungan operasional yang memadai, termasuk biaya operasional lapangan dan kebutuhan administrasi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
3	Sarana prasarana	Sarana prasarana pendukung penyuluhan, termasuk kendaraan operasional, fasilitas BPP, dan peralatan lapangan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
4	Materi dan media penyuluhan	Materi dan media penyuluhan yang mutakhir dan mudah diakses, baik dalam bentuk cetak maupun digital	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
5	Sistem pendukung digital	Sistem pendukung digital yang sederhana dan fungsional, termasuk akses internet, perangkat kerja, dan basis data petani	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta
6	Jaringan dan kemitraan	Penguatan jaringan dan kemitraan dengan perguruan tinggi, pihak swasta, dan lembaga terkait untuk mendukung keberlanjutan penyuluhan	Pemerintah Daerah, BPP, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas penyuluhan menempati prioritas utama, diikuti oleh dukungan operasional dan sarana prasarana penyuluhan. Sementara itu, sistem pendukung digital dan penguatan jaringan kemitraan diposisikan sebagai faktor penguatan keberlanjutan penyuluhan pertanian. Susunan prioritas ini mencerminkan kebutuhan nyata penyuluhan di lapangan dan menegaskan pentingnya intervensi yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan sistem pendukung penyuluhan. Susunan prioritas kebutuhan penyuluhan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1

selanjutnya dipahami tidak sebagai daftar yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu alur pemikiran yang utuh dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperjelas keterkaitan antara kondisi penyuluhan di lapangan, proses partisipatif yang ditempuh, serta luaran dan implikasi yang dihasilkan, pemetaan tantangan dan kebutuhan penyuluhan disajikan dalam bentuk kerangka pikir. Kerangka pikir tersebut disajikan pada Gambar 2, yang menggambarkan alur pemetaan tantangan dan kebutuhan penyuluhan pertanian melalui pendekatan partisipatif berbasis mini FGD.



Gambar 2. Kerangka Pikir Pemetaan Tantangan dan Kebutuhan Penyuluhan Pertanian melalui Pendekatan Partisipatif  
(Sumber gambar: penulis)

Kerangka pikir ini menggambarkan alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memetakan tantangan dan kebutuhan penyuluhan pertanian melalui pendekatan partisipatif berbasis mini FGD. Proses dimulai dari kondisi awal penyuluhan di lapangan, dilanjutkan dengan identifikasi tantangan dan kebutuhan penyuluhan, penyusunan skala prioritas pemenuhan kebutuhan, hingga implikasinya terhadap peningkatan kualitas penyuluhan pertanian yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

### Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini didukung oleh beberapa faktor pendorong, antara lain tingginya antusiasme dan keterbukaan penyuluhan dalam mengikuti kegiatan, serta dukungan kelembagaan dari pihak BPP setempat. Partisipasi aktif penyuluhan selama diskusi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan aspirasi.

Namun demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan akibat padatnya jadwal kerja penyuluhan, serta keterbatasan durasi kegiatan yang belum memungkinkan pendalamannya seluruh permasalahan secara menyeluruh. Meskipun demikian, kegiatan ini menghasilkan luaran awal yang dapat dijadikan dasar untuk kegiatan lanjutan yang lebih mendalam.

### Pembahasan Luaran Program dan Implikasinya

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini berupa peta tantangan penyuluhan, pemetaan kebutuhan, dan skala prioritas pemenuhan kebutuhan menunjukkan bahwa permasalahan penyuluhan pertanian bersifat kompleks dan saling terkait. Hasil ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas penyuluhan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipasi aktor lapangan dinilai lebih efektif dalam memperkuat sistem penyuluhan pertanian yang adaptif dan berkelanjutan (Hermans dkk., 2023; Tran dkk., 2025), serta perlu didukung oleh penguatan kapasitas dan pengembangan *human capital* penyuluhan secara berkelanjutan (Busindeli dkk., 2024). Penguatan peran penyuluhan melalui peningkatan kapasitas dan dukungan sistem juga terbukti berkontribusi terhadap efektivitas kelembagaan petani dan kemandirian aktor pertanian di era digital (Shaliza dkk., 2025). Dalam konteks ini, hasil pemetaan kebutuhan penyuluhan menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja penyuluhan yang lebih kontekstual, mengingat penilaian kinerja yang tidak mempertimbangkan beban kerja, keterbatasan sumber daya, dan dukungan sistem cenderung menghasilkan kebijakan penguatan yang kurang tepat sasaran (Astari dkk., 2023).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan data lapangan yang kontekstual dan berbasis partisipasi penyuluhan. Luaran program tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan kegiatan, tetapi juga sebagai dasar perencanaan kebijakan dan program penguatan penyuluhan pertanian di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya perbaikan sistem penyuluhan pertanian yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

## 4. PENUTUP

### **Simpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memetakan tantangan dan kebutuhan penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian. Berdasarkan hasil kegiatan, diketahui bahwa penyuluhan pertanian menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek struktural, teknis, kelembagaan, dan psikososial. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan beban kerja yang tinggi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, minimnya pelatihan berkelanjutan yang kontekstual, serta lemahnya koordinasi dan dukungan kelembagaan.

Melalui pendekatan partisipatif berupa diskusi kelompok terarah, kegiatan ini mampu menghasilkan luaran utama berupa peta tantangan penyuluhan, pemetaan kebutuhan penyuluhan, serta skala prioritas pemenuhan kebutuhan yang disepakati bersama. Berdasarkan pemetaan yang disajikan dalam Tabel 1, pengembangan kapasitas penyuluhan menempati prioritas utama, diikuti oleh dukungan operasional dan pemenuhan sarana prasarana penyuluhan, sementara sistem pendukung digital dan penguatan kemitraan berperan sebagai faktor penguatan keberlanjutan penyuluhan pertanian. Faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan ini adalah partisipasi aktif dan keterbukaan penyuluhan dalam menyampaikan pengalaman lapangan, serta dukungan kelembagaan dari Balai Penyuluhan Pertanian setempat. Adapun faktor penghambat kegiatan meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan akibat padatnya tugas penyuluhan serta keterbatasan durasi kegiatan yang belum memungkinkan pendalaman seluruh permasalahan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata penyuluhan pertanian di tingkat lapangan dan menjadi langkah awal yang strategis dalam perbaikan kualitas sistem penyuluhan pertanian berbasis kebutuhan penyuluhan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dan capaian kegiatan, disarankan agar pemetaan kebutuhan penyuluhan pertanian dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam perencanaan program penyuluhan di tingkat daerah. Program penguatan penyuluhan pertanian selanjutnya perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas penyuluhan melalui pelatihan yang relevan dan kontekstual, disertai dengan pemenuhan dukungan operasional dan sarana prasarana sebagaimana hasil skala prioritas pemetaan kebutuhan penyuluhan. Hasil pemetaan yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program pelatihan yang lebih tepat sasaran, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi kelembagaan antar pemangku kepentingan.

Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan, diperlukan tindak lanjut berupa program penguatan kapasitas penyuluhan yang lebih spesifik dan aplikatif sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, penguatan sistem pendukung digital dan pengembangan jaringan kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, pihak swasta, dan lembaga terkait perlu terus didorong sebagai strategi pendukung guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan penyuluhan pertanian. Penguatan kapasitas penyuluhan perlu dipandang sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia jangka panjang, yang menuntut dukungan pembelajaran berkelanjutan, penguatan kompetensi, serta sistem kelembagaan yang adaptif agar kinerja dan profesionalisme penyuluhan dapat terjaga secara berkesinambungan (Adhikara dkk., 2025). Keterlibatan perguruan tinggi dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terbukti memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pengabdian berbasis kebutuhan lokal (Wahyuni dkk., 2025). Dengan kolaborasi multipihak yang berkesinambungan, upaya peningkatan kualitas penyuluhan pertanian diharapkan tidak bersifat insidental, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kinerja penyuluhan dan pembangunan pertanian di tingkat lokal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, C. T., Nugraha, A. P., Judijanto, L., Astitiani, N. L. P. S., Simarmata, N., Perwira, I., Prawitowati, T., Estede, S., Prayitno, E., Lestari, E., Siregar, I., & Padauleng, A. (2025). *Sumber Daya Manusia yang Unggul* (F. Mulya & F. Shaliza, Eds.). Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Akbar, M. F., Alwi, Susanti, G., & Nahruddin, Z. (2022). Collaborative arrangement in the implementation of food security policy in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 21(2), 39–48. <https://doi.org/10.13165/VPA-22-21-2-08>
- Astari, R. D., Padmaningrum, D., & Rusdiyana, E. (2023). Evaluasi Kinerja Penyuluhan dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Lahan Kering. *Jurnal Triton*, 14(1), 29–44. <https://doi.org/10.47687/jt.v14i1.274>
- Busindeli, I. M., Nyamba, S. Y., & Akeredolu, M. (2024). Human Capital Development Programme for Mid-Career Agricultural Extension Workers: The Case of Sokoine University of Agriculture Bsc. Agricultural Extension and Education Training Programme. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 24(3), 25689–25711. <https://doi.org/10.18697/ajfand.128.21055>

- Delgado, L., & Stoorvogel, J. J. (2022). Role of soil perception and soil variability by smallholder farmers in the low adoption rates of extension packages in Central America. *Journal of Rural Studies*, 93, 92–103. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.05.009>
- Erlianti, D., Ervita, D., Maharami, D., Lestari, H. K., & Siagian, H. S. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 06(01), 1–10. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.242>
- Handono, S. Y., Hidayat, K., Purnomo, M., & Toiba, H. (2023). Community resilience to natural resource vulnerability due to sand mining through the application of Integrated Farming System (IFS). *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 10(4), 4697–4708. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2023.104.4697>
- Hermans, T. D. G., Smith, H. E., Whitfield, S., Sallu, S. M., Recha, J., Dougill, A. J., Thierfelder, C., Gama, M., Bunderson, W. T., Museka, R., Doggart, N., & Meshack, C. (2023). Role of the interaction space in shaping innovation for sustainable agriculture: Empirical insights from African case studies. *Journal of Rural Studies*, 100. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103012>
- Hildawati, Haryani, Umar, N., Suprayitno, D., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, D. I. D., Budiman, Y. U., Saktisyahputra, Ginting, T. W., Faisal, Thomas, A., Sampebua, M. R., Susiang, M. I. N., & Judijanto, L. (2024). *Literasi Digital: Wawasan Cerdas dalam Perkembangan Dunia Digital Terkini*. PT. Green Pustaka Indonesia. [www.greennpustaka.com](http://www.greennpustaka.com)
- Indrawati, D., & Yuliantoro, D. (2022). Peran Penyuluhan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 6(1), 130–141. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.01.12>
- Jamil, M. H., Basmahuddin, N. R. A., Dammallino, E. B., & Ridwan, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluhan Pertanian dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Penyuluhan*, 19(01), 80–92. <https://doi.org/10.25015/19202341935>
- Kansanga, M. M., Kerr, R. B., Lupafya, E., Dakishoni, L., & Luginaah, I. (2021). Does participatory farmer-to-farmer training improve the adoption of sustainable land management practices? *Land Use Policy*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105477>
- Khan, M. Z., Khan, A., Pervaiz, U., Farooq, A., & Saqib, R. (2022). The role of agricultural extension workers' competency in climate scenarios through Farm Services Centers (FSCS) in improving the yield and performance of targeted farming community (A case study of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1016(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1016/1/012010>
- Kule, E. K., Obia, A., Agole, D., Okello, D. M., & Odongo, W. (2025). Farmer perceptions and their implications for adoption of sustainable agricultural intensification practices. *Discover Sustainability*, 6(210). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00929-z>
- Latif, A., Ilsan, M., & Rosada, I. (2022). Hubungan Peran Penyuluhan Pertanian terhadap Produktivitas Petani Padi (Studi Kasus Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru). *WIRATANI: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(1), 11–21. <https://jurnal.agribisnis.umi.ac.id/index.php/wiratani/article/view/91>
- Lestari, E., Rusdiyana, E., Sugihardjo, Setiyowati, R., Widiyanto, & Santoso, I. S. (2024). The role of village owned enterprises in the development and sustainability of the agrotourism sector (A case study of agrotourism in Karanganyar Regency, Central Java). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1302(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1302/1/012132>
- Mirza, D., Suryani, L., Latip, & Aditiya, V. (2023). Literature Review: Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi. *JAPABIS: Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 5(1), 51–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.84>
- Modeong, C. P., Ruauw, E., & Benu, N. M. (2023). Kinerja Penyuluhan Pertanian Lapangan di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Agri-SosioEkonomi*, 19(2), 815–824. <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.48317>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Perosa, B., Newton, P., & Carrer, M. J. (2021). Access to information affects the adoption of integrated systems by farmers in Brazil. *Land Use Policy*, 106. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105459>
- Roy, A., Kumar, S., & Rahaman, M. (2024). Exploring climate change impacts on rural livelihoods and adaptation strategies: Reflections from marginalized communities in India. *Environmental Development*, 49. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100937>
- Sartas, M., Schut, M., Proietti, C., Thiele, G., & Leeuwis, C. (2020). Scaling Readiness: Science and practice of an approach to enhance impact of research for development. *Agricultural Systems*, 183. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.102874>

Shaliza, F., Sumardjo, S., Sadono, D., & Uchrowi, Z. (2025). The synergy of agricultural extension and farmer group leadership in promoting farmers' independence in the digital era. *BIO Web of Conferences*, 186, 02007. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202518602007>

Tran, T. A., Cook, B. R., & Touch, V. (2025). Agricultural extension institutions in rural Cambodia: Unpacking extension agent-farmer relations and interactions. *Journal of Rural Studies*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103671>

Wahyuni, L., Erlanti, D., Armanda, Mhd. S. F., & Cahyani, W. (2025). Peran Perguruan Tinggi Bersama Pemerintah Daerah dalam Mensukseskan Program Penurunan Stunting di Kota Dumai. *Bidik: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 14–20. <https://doi.org/10.31849/bidik.v6i1.8246>